

HUBUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DENGAN MASYARAKAT

Saiful Bahri
saifulb2281@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat memiliki posisi ganda yaitu posisi objek dan posisi subjek yang keduanya memiliki makna fungsional bagi pengelolaan lembaga pendidikan. Ketika lembaga pendidikan sedang melakukan promosi merekrut calon siswa/santri/mahasiswa baru, maka masyarakat sebagai objek yang mutlak dibutuhkan. Sedangkan respon masyarakat terhadap promosi itu menempatkan mereka sebagai subjek yang memiliki kewenangan penuh untuk menerima atau menolaknya. Peran Komite Sekolah adalah: *advisory agency; supporting agency; controlling agency; mediator*. Hubungan masyarakat sangat penting dalam kepentingan suatu organisasi sekolah, jadi jelaslah bahwa dalam public relation terdapat suatu usaha untuk mewujudkan suatu hubungan yang harmonis antara sekolah dengan publik sehingga akan muncul opini publik yang menguntungkan bagi kehidupan sekolah tersebut.

Kata Kunci : Hubungan, Lembaga Pendidikan, Masyarakat

ABSTRACT

Society has a dual position of object position and subject position that both have functional meaning for the management of educational institutions. When educational institutions are promoting to recruit new students / students / students, then the community as an object that is absolutely necessary. While the public response to the promotion puts them as subjects who have full authority to accept or reject it. The role of the School Committee is: advisory agency; Supporting agency; Controlling agency; Mediator. Public relations is very important in the interests of a school organization, so it is clear that in public relations there is an attempt to create a harmonious relationship between school and the public so that will emerge public opinion that is profitable for the life of the school.

Keyword : Relations, Educational Institutions, Society

A. PENDAHULUAN

Eksistensi lingkungan pendidikan dalam Pendidikan Islam memiliki arti yang sangat urgent. Keduanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Hubungan antara sekolah dan masyarakat pada hakekatnya adalah suatu sarana yang cukup mempunyai peranan yang menentukan dalam

rangka usaha mengadakan pembinaan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik di sekolah¹. Ada suatu kebutuhan yang sama antara keduanya, baik dilihat dari segi edukatif maupun dilihat dari segi psikologis. Hubungan antara sekolah dan masyarakat lebih dibutuhkan dan lebih terasa fungsinya, karena adanya kecenderungan perubahan dalam pendidikan yang menekankan perkembangan pribadi dan sosial anak melalui pengalaman-pengalaman anak di bawah bimbingan guru, baik di luar maupun di dalam sekolah.

Perkembangan dalam pendidikan mengharuskan sekolah mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Elsbree, sebagaimana dikutip Sulistyorini dan Fathurrohman, menyatakan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan sekolah harus berhubungan dengan masyarakat, yaitu; (1) faktor perubahan sifat, tujuan, dan metode mengajar di sekolah, (2) faktor masyarakat, yang menuntut adanya perubahan-perubahan dalam pendidikan di sekolah dan perlunya bantuan masyarakat terhadap sekolah, (3) faktor perkembangan ide demokrasi bagi masyarakat terhadap pendidikan.²

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa organisasi pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu bentuk organisasi yang terbuka. Sebagai sistem terbuka, berarti lembaga pendidikan selalu mengadakan kontak hubungan dengan lingkungannya yang disebut sebagai *supra sistem*. Kontak hubungan ini dibutuhkan untuk menjaga agar sistem atau lembaga itu tidak mudah punah atau mati. Hal ini, berarti bahwa hidup atau matinya sistem lembaga pendidikan itu sebagian besar ditentukan oleh usaha lembaga itu sendiri.

Sekolah yang tidak mempunyai nama baik dimata masyarakat dan akhirnya mati, adalah suatu sekolah yang tidak mampu membuat hubungan baik dengan masyarakat pendukungnya atau yang menjadi *stakeholder* sekolah. Sebaliknya sekolah yang mampu mengadakan kontak hubungan dengan masyarakat akan bisa bertahan lama, malah bisa akan terus maju,. Kendatipun pada mulanya sekolah tersebut belum banyak punya fasilitas, dana masih kecil, dan sebagainya, namun karena kemampuan manajernya mendekati para dermawan, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang cinta akan pendidikan, dan disertai dengan himbauan- himbauanya yang memikat dan rasional, maka sekolah itu akan bertahan lama. Daya tahan ini akan semakin kuat jika sekolah dapat menunjukkan mutunya kepada masyarakat.

¹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 50.

² Sulistyorini & Muhammad Fathurrohman, *Esensi Manajemen Pendidikan Islam: Pengelolaan Lembaga untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2014), 289.

Hubungan sekolah/sekolah Islam atau madrasah dengan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah Islam atau pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Sebaliknya sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah Islam berkewajiban untuk memberi penerangan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, serta keadaan masyarakat. Sebaliknya, sekolah Islam juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat, terutama terhadap sekolah Islam. Dengan perkataan lain, antara sekolah Islam atau madrasah dan masyarakat harus dibina suatu hubungan yang harmonis.

Hubungan yang harmonis antara sekolah Islam dan masyarakat ini semakin dirasakan pentingnya pada masyarakat yang telah menyadari dan memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Namun tidak berarti pada masyarakat yang masih kurang menyadari dari pentingnya pendidikan, hubungan kerja sama ini tidak perlu dibina. Pada masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan, sekolah Islam dituntut lebih efektif dan kreatif untuk menciptakan hubungan kerja sama yang lebih harmonis.

Jika hubungan sekolah Islam dengan masyarakat berjalan dengan baik, rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga akan baik dan tinggi. Agar tercipta hubungan dan kerja sama yang baik antara sekolah Islam dan masyarakat, masyarakat perlu mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang sekolah Islam yang bersangkutan. Gambaran dan kondisi sekolah Islam ini dapat diinformasikan kepada masyarakat melalui laporan kepada orang tua murid, buletin bulanan, penerbitan surat kabar, pameran sekolah Islam, open hous, kunjungan ke sekolah Islam, kunjungan ke rumah murid, penjelasan oleh staf sekolah, murid, radio dan televisi, serta laporan tahunan.

Kepala sekolah yang baik merupakan salah satu kunci untuk bisa menciptakan hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat secara efektif karena harus menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik di sekolah Islam dan apa yang dipikirkan orang tua tentang sekolah Islam. Kepala sekolah Islam dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan meningkatkan hubungan kerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah Islam yang efektif dan efisien. Hubungan yang harmonis ini akan membentuk :

1. Saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk dunia krja.

2. Saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing.
3. Kerja sama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa ikut bertanggung jawab atau suksesnya pendidikan di sekolah.

Melalui hubungan yang harmonis tersebut diharapkan tercapai tujuan hubungan sekolah Islam dengan masyarakat, yaitu terlaksananya proses pendidikan di sekolah Islam secara produktif, efektif, dan efisien sehingga menghasilkan lulusan sekolah Islam yang produktif dan berkualitas. Lulusan yang berkualitas ini tampak dari penguasaan peserta didik terhadap ilmu. Pengetahuan, ketrampilan dan sikap, yang dapat dijadikan bekal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya atau hidup di masyarakat sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup.

B. METODE PENELITIAN

Melihat makna yang tersirat dari judul dan permasalahan yang dikaji, penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan penghitungan data secara kuantitatif.³ Ada beberapa kunci utama dalam penelitian literatur (pustaka) dengan pendekatan kualitatif, yaitu: (a) *The researcher is the main instruments that will read the literature accurately*; (b) *The research is done descriptively. It means describing in the form of words and picture not in the form of number*; (c) *More emphasized on the process not on the result because the literature is a work that rich of interpretation*; (d) *The analysis is inductive*; (e) *The meaning is the main point*.

Literatur utama atau primer yang dikaji dalam penelitian ini adalah buku dan literatur *public relation* atau manajemen hubungan masyarakat, seperti: Rosady Ruslan, *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*, Oemi Abdurrachman, *Dasar-Dasar Public Relations*, Emery Stoop et.al., *Handbook of Educational Administration Second Edition*, C.L.Brownwll., L. Gans, T.Z Maroon, *Public Relation In Education*, Onong Uchjana Effendy, *Hubungan Masyarakat: suatu studi Komunikologis* dan sebagainya.

Sebagai penelitian *kepuustakaan*, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah metode dokumentasi, yaitu data tentang variabel yang berupa buku, catatan, transkrip, surat kabar, majalah, jurnal, dan lain sebagainya. Sedangkan teknik analisis data

³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), 2.

yang dipilih adalah deskriptif analisis dengan menggunakan serangkaian tata fikir logik yang dapat dipakai untuk mengkonstruksikan sejumlah konsep menjadi proposisi, hipotesis, postulat, aksioma, asumsi, ataupun untuk mengkontruksi menjadi teori. Tata fikir tersebut⁴ adalah (a) tata fikir perseptif, yang dipergunakan untuk mempersepsi data yang sesuai dan relevan dengan pokok-pokok permasalahan yang diteliti; (b) tata fikir deskriptif, yang digunakan untuk mendeskripsikan data secara sistematis sesuai dengan sistematika pembahasan yang dipakai dalam penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

Peran Sekolah Dalam Masyarakat

Masyarakat dengan lembaga pendidikan bisa dilukiskan sebagai kotaan atau pedesaan, sebagai pertanian atau non-pertanian, sebagai industri atau non-pemukiman, sebagai kelas pertengahan atau kelas bawahan. Jadi yang dihadapi oleh lembaga pendidikan sebenarnya bukan satu masyarakat yang memiliki kepentingan dan masalah yang sama, yaitu pendidikan anak yang sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Lukisan tentang hakekat masyarakat sekolah ini mungkin bisa memberikan petunjuk kepada administrator lembaga pendidikan tentang bagaimana ia hendak bekerja dengan masyarakat.⁵

Seorang manajer pendidikan harus menyadari bahwa masyarakat memiliki peranan yang sangat penting terhadap keberadaan, kelangsungan bahkan kemajuan lembaga pendidikan baik yang umum maupun yang Islam. Setidaknya salah satu parameter penentu nasib lembaga pendidikan adalah masyarakat. Bila terdapat lembaga pendidikan mengalami kemajuan, salah satu penentunya karena keterlibatan yang maksimal dari masyarakat. Begitu pula sebaliknya, bila terdapat lembaga pendidikan yang memprihatinkan, salah satu penyebabnya karena masyarakat enggan mendukungnya, meskipun sikap masyarakat ini menjadi akibat dari penyebab lainnya baik bersifat internal maupun eksternal dari lembaga pendidikan itu sendiri.

Dalam hal ini, maka kepercayaan masyarakat menjadi salah satu kunci kemajuan lembaga pendidikan. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan terhadap suatu lembaga pendidikan, mereka akan mendukung penuh bukan saja dengan memasukkan putra-putrinya

⁴Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 55.

⁵Oteng Sutisna, *Administrasi Pendidikan: Dasar Teoritis untuk Praktek Profesional*, (Bandung: Angkasa, 1983), 144.

ke dalam lembaga itu tetapi bahkan mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Sebaliknya, ketika masyarakat tidak percaya, mereka bukan hanya tidak mau memasukkan putra-putrinya ke lembaga tersebut tetapi bahkan memprovokasi tetangganya atau kawannya supaya tidak memasukkan putra-putrinya ke lembaga tersebut. Ini berarti masyarakat sebagai komponen strategis yang harus mendapat perhatian penuh oleh manajer pendidikan.

Masyarakat memiliki posisi ganda yaitu posisi objek dan posisi subjek yang keduanya memiliki makna fungsional bagi pengelolaan lembaga pendidikan. Ketika lembaga pendidikan sedang melakukan promosi merekrut calon siswa/santri/mahasiswa baru, maka masyarakat sebagai objek yang mutlak dibutuhkan. Sedangkan respon masyarakat terhadap promosi itu menempatkan mereka sebagai subjek yang memiliki kewenangan penuh untuk menerima atau menolaknya. Manajer lembaga pendidikan tidak berwenang memaksa sikap mereka. Posisi masyarakat sebagai subjek juga terjadi ketika mereka berkapasitas sebagai pengguna lulusan-lulusan lembaga tersebut. Maka mereka harus dikelola dengan baik

Upaya menjalin hubungan lembaga dengan masyarakat diharapkan membuahkan hasil nyata bagi lembaga pendidikan. Made Pidarta menyatakan bahwa hubungan kerjasama lembaga dengan masyarakat melalui pendekatan situasional, memungkinkan lembaga itu tetap tegak berdiri. Sebab ia berada dan hidup bersama masyarakat dan sekaligus menjadi mercu penerang atau inovator bagi masyarakat.⁶ Kegunaan kerjasama juga dirasakan masyarakat sehingga terjadi dampak yang saling menguntungkan kedua belah pihak atau *simbiosis mutualisme*. Mengenai keuntungan kedua belah pihak ini, Stoop mengatakan bahwa kerjasama seperti ini mengisyaratkan adanya informasi yang berkelanjutan di antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Informasi itu seharusnya bersifat dua arah yaitu dari lembaga ke masyarakat dan dari masyarakat ke lembaga pendidikan.⁷

Pada prinsipnya hubungan sekolah dan masyarakat sangat erat. Sekolah di sini sebagai pelaksana agar masyarakat menjadi lebih baik, dan murid-murid lebih aktif di masyarakat. Sekolah masyarakat berangkat dari asumsi bahwa masyarakat sebagai dasar dari pendidikan dan masyarakat sebagai pendidik, (*educatife agent*). Sifat sekolah masyarakat adalah 1) Mengajarkan anak-anak untuk dapat mengembangkan dan menggunakan sumber-sumber dari keadaan setempat. 2) Sekolah ini melayani keseluruhan masyarakat, tidak hanya untuk

⁶ Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1988), 193-194

⁷ Emery Stoop et.al., *Handbook of Educational Administration Second Edition*, (A. Boston: Allyn and Bacon Inc., 1981), 464

anak-anak. Dari sifat-sifat sekolah masyarakat ini didapatkan beberapa kriteria sekolah masyarakat sebagai berikut:⁸

1. Sekolah sebagai guru kehidupan masyarakat terhadap anak-anak, mencakup :
 - a. Sekolah mempunyai suatu pemerintahan sekolah, dimana anak-anak belajar untuk memerintahkan mereka sendiri, mempunyai program-program yang bermacam-macam dan mengizinkan anak-anak untuk mendapatkan sesuatu yang konstruktif yang dapat mereka kerjakan secara serius
 - b. Menggunakan sumber masyarakat lokal, anak-anak diajak untuk menyelidiki industri lokal, penjual di pasar, museum dan sebagainya. Dan sebaliknya membawa orang-orang dewasa dari masyarakat itu untuk mengajarkan anak-anak mengenai pengetahuan yang khas dan cara-cara kehidupan
 - c. Sekolah bekerja untuk memperbaiki masyarakat lokal
 - d. Sekolah cenderung untuk mengorganisir kurikulum pada kelas-kelas yang mula-mula ada disekitar masalah-masalah lokal dan isu-isu lokal.
2. Sekolah sebagai pusat kehidupan masyarakat untuk penduduk dari semua umur dan kelas, mencakup:
 - a. Membantu fasilitas-fasilitas fisik untuk belajar dan berekreasi bagi semua umur masyarakat
 - b. Sekolah mempunyai pendidikan orang dewasa
 - c. Membawa orang-orang muda dan orang dewasa bersama-sama untuk bekerja
 - d. Membawa peran guru ke dalam kehidupan masyarakat sebagai teman.

Peran Komite Sekolah Dalam Program Sekolah

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu wadah tersebut adalah Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan komite sekolah di tingkat satuan pendidikan.

Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.⁹

⁸ Abu Ahmadi, *Sosiologi pendidikan*, (Surabaya, PT Bina Ilmu, 1982), 112-113

⁹ Pasal 56, ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003.

Dewan pendidikan dan komite sekolah merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam UU Nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (Propernas 2000 – 2004). Amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang telah memposisikan kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada kabupaten/kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat atau stakeholder pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat (*Community-based participation*) dan manajemen berbasis sekolah (*school-based management*).

Paradigma manajemen berbasis sekolah (MBS) beranggapan bahwa, satu-satunya jalan masuk yang terdekat menuju peningkatan mutu dan relevansi adalah demokratisasi, partisipasi dan akuntabilitas pendidikan. Kepala sekolah, guru, dan masyarakat adalah pelaku utama dan terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah sehingga segala keputusan mengenai penanganan persoalan pendidikan pada tingkatan mikro harus dihasilkan dari interaksi ketiga pihak tersebut. Masyarakat adalah stakeholder pendidikan yang memiliki kepentingan akan keberhasilan pendidikan di sekolah, karena mereka adalah pembayar pendidikan melalui pembayaran pajak, sehingga sekolah-sekolah harus bertanggungjawab terhadap masyarakat.

Namun demikian, entitas yang disebut “masyarakat” itu sangat kompleks dan tak terbatas (*borderless*) sehingga sangat sulit bagi sekolah untuk berinteraksi dengan masyarakat sebagai stakeholder pendidikan. Untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah, konsep masyarakat itu perlu disederhanakan (*simplified*) agar menjadi mudah bagi sekolah melakukan hubungan dengan masyarakat itu. Penyederhanaan konsep masyarakat itu dilakukan melalui “perwakilan” fungsi stakeholder, dengan jalan membentuk komite sekolah di tingkat satuan pendidikan.

Komite sekolah hendaknya merepresentasikan keragaman yang ada agar benar-benar dapat mewakili masyarakat. interaksi antara masyarakat dapat diwujudkan melalui mekanisme pengambilan keputusan antara sekolah dengan komite sekolah. Dengan demikian, komite sekolah merupakan badan yang mandiri yang mewadahi peran serta

masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Disamping itu, komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Maksud dan tujuan dibentuknya Komite Sekolah adalah agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Komite Sekolah yang dibentuk dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat. Komite Sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada:

1. Pengguna (*client model*)
2. Berbagi kewenangan (*power sharing and advocacy model*)
3. Kemitraan (*partnership model*)

Tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggung-jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Peran Komite Sekolah adalah:

1. Sebagai Lembaga PEMBERI PERTIMBANGAN (*advisory agency*)
2. Sebagai Lembaga PENDUKUNG (*supporting agency*)
3. Sebagai Lembaga PENGONTROL (*controlling agency*)
4. Sebagai MEDIATOR¹⁰

Perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan dalam era reformasi, dan era otonomi penyelenggaraan pendidikan sampai pada tingkat kabupaten/kota dan bahkan

¹⁰Surya Dharma, *Manajemen Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pendidikan Sekolah*, (Jakarta: Dirjen PMPTK, 2007), 129.

otonomi pada tingkat sekolah, memberikan keleluasaan bagi setiap sekolah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan sekolah. Dengan demikian diharapkan akan memacu percepatan peningkatan mutu penyelenggaraan sekolah yang pada gilirannya mempercepat peningkatan mutu hasil belajar secara keseluruhan.

Konsekuensi dari paradigma pendidikan yang memberikan otonomi sampai pada tingkat sekolah menuntut sekolah untuk memberdayakan semua sumber daya yang dimilikinya. Salah satu sumber daya yang sangat potensial dan dimiliki oleh sekolah adalah masyarakat dan orang tua murid.

Di Amerika Serikat, pengembangan sekolah di pedesaan atau di daerah-daerah urban berada di tangan dewan masyarakat sekolah (SCC=*School Community Council*). Dewan ini terdiri dari unsure-unsur tenaga profesional pendidikan dan anggota masyarakat, dalam rangka pengembangan staf.¹¹

Aspek struktural dari pelibatan masyarakat berarti adanya kesamaan atau keseimbangan antar struktur yang terlibat dalam pembuatan keputusan. Aspek prosedural pelibatan masyarakat berarti mengandung makna adanya kesamaan masukan dari kelompok profesional dan anggota-anggota masyarakat dalam menentukan aktivitas pengembangan staf untuk meningkatkan praktek-praktek penyelenggaraan sekolah yang berkualitas. Secara organisatoris dewan SCC ini memiliki tanggung jawab bersama sekolah untuk meningkatkan mutu pelayanan sekolah.

Di sisi lain SCC ini ternyata juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan analisis kebutuhan sekolah dan kebutuhan masyarakat melalui survey yang dilakukannya. Hasil analisis yang dilakukan dewan ini didiskusikan bersama pihak sekolah dengan melibatkan para ahli seperti konsultan dan sebagainya untuk diterjemahkan menjadi kebijakan dan program sekolah.

Kebijakan model pelibatan masyarakat dalam pendidikan melalui lembaga SCC seperti di Amerika ini sebenarnya sudah sejak lama dikenal dan dilakukan oleh pendidikan dan persekolahan di Indonesia, mulai dari POM, POMG, BP3, hingga sekarang yang dikenal dengan Komite Sekolah. Tetapi hasilnya belum terlalu nampak karena keterlibatan mereka lebih banyak pada membantu keuangan sekolah. Akhir-akhir ini pemerintah Indonesia dalam hal ini Depdiknas membuat kebijakan baru dengan mengganti istilah BP3

¹¹Surya Dharma, *Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Dirjen PMPTK, 2007), 61.

menjadi Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah di tingkat sekolah.

Pemerintah (Depdiknas) pada saat ini memberikan peluang kepada sekolah dalam pemberdayaan masyarakat melalui suatu lembaga yang dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah yaitu Dewan Sekolah atau Komite Sekolah.

Urgensi Program Humas di Lembaga Pendidikan

Salah satu faktor sebab menurunnya semangat partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah, dahulu sekolah sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat, dan merekalah yang membangun dan memelihara sekolah, mengadakan sarana pendidikan, serta mengadakan iuran untuk mengadakan operasional sekolah. Jika sekolah telah mereka bangun, masyarakat hanya meminta guru-guru kepada pemerintah untuk diangkat ada sekolah mereka itu. Pada waktu itu, kita sebenarnya telah mencapai pembangunan pendidikan yang berkelanjutan (*sustainable development*), karena sekolah adalah sepenuhnya milik masyarakat yang senantiasa bertanggung jawab dalam pemeliharaan serta operasional pendidikan sehari-hari. Pada waktu itu, pemerintah berfungsi sebagai penyeimbang, melalui pemberian subsidi bantuan bagi sekolah-sekolah pada masyarakat yang benar-benar kurang mampu.¹²

Salah satu jalan masuk yang terdekat menuju peningkatan mutu dan relevansi adalah demokratisasi, partisipasi dan akuntabilitas pendidikan. Kepala sekolah, guru dan masyarakat adalah pelaku utama dan terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah sehingga segala keputusan mengenai penanganan persoalan pendidikan pada tingkatan mikro harus dihasilkan dari interaksi ketiga pihak tersebut. Masyarakat adalah stakeholder pendidikan yang memiliki kepentingan akan keberhasilan pendidikan di sekolah, karena mereka adalah pembayar pendidikan, baik melalui uang sekolah maupun pajak, sehingga sekolah-sekolah seharusnya bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Hubungan masyarakat sangat penting dalam kepentingan suatu organisasi sekolah, jadi jelaslah bahwa dalam publik relation terdapat suatu usaha untuk mewujudkan suatu hubungan yang harmonis antara sekolah dengan publik sehingga akan muncul opini publik yang menguntungkan bagi kehidupan sekolah tersebut.

¹² C.L. Brownwill, L. Gans, Maroon T.Z., *Public Relation In Education*, (New York: Mc Grow Hill Book Company, Inc, 1955), 78

Dari situ jelas bahwa lingkungan pendidikan bukanlah suatu badan yang berdiri sendiri, melainkan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat luas. Ia sebagai sistem terbuka yang selalu mengadakan hubungan (kerja sama) yang baik dengan masyarakat, secara bersama-sama membangun pendidikan. Hal ini sangat mungkin sebab dalam era perkembangan teknologi modern seperti sekarang ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan menjadi modal utama dalam membangun dan memajukan bangsa termasuk masyarakat itu sendiri. Bila lembaga pendidikan terbuka bagi para siswa/mahasiswa maka begitu pula hendaknya bagi masyarakat.¹³

Dari masyarakat, sekolah dapat memanfaatkan segala sumber daya manusia dan non manusia semaksimal mungkin atas persetujuan dari masyarakat sendiri. Dengan demikian, jika sekolah dapat dimanfaatkan semua sumber daya yang ada pada masyarakat untuk menunjang semua program sekolah, maka diharapkan kualitas belajar dan pertumbuhan siswa akan meningkat. Selanjutnya jika para siswa lulusan sekolah berkualitas, maka diharapkan mereka telah terjun ke masyarakat melalui berbagai kegiatan masyarakat yang berguna bagi kemakmuran dirinya, keluarganya dan akhirnya bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sekolah diharapkan dapat melaksanakan hubungan dengan masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga masyarakat tetap memiliki kegairahan yang tinggi untuk membantu program sekolah. Untuk melihat sejauhmana kerja sama antara sekolah dan masyarakat terlaksana secara efektif, maka diperlukan adanya kesepakatan bersama sebagai pedoman agar tidak terjadi salah pengertian di kemudian hari.¹⁴

Seorang manajer lembaga pendidikan harus mampu mengemas program-program dan keberhasilan lembaga pendidikan yang dikendalikan itu benar-benar menarik sehingga mampu menyerap perhatian yang besar dari masyarakat. Dalam melaksanakan tugas ini sebenarnya penuh dengan seni *me-manage* karena manajer berupaya keras untuk memunculkan daya tarik masyarakat sehingga termasuk wilayah estetika. Masyarakat terkadang menjadi tertarik pada program lembaga pendidikan tidak semata-mata lantaran manajer telah melakukan kejujuran/amanat, tetapi bisa jadi mereka lebih tergerak setelah ada kemasan-kemasan tertentu. Di sinilah arti penting *public relation*.

¹³ Pidarta, *Manajemen Pendidikan...*, 189

¹⁴ Sulistyorini & Fathurrohman, *Esensi Manajemen...*, 294.

Maka dari itu, dalam al-Qur'an terdapat berbagai kaidah yang dapat digunakan sebagai pedoman hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat.

1. Menggunakan bahasa komunikasi yang agung dan memuliakan pihak lain.

أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا (40)

Maka apakah patut Tuhan memilhkan bagimu anak-anak laki-laki sedang Dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat? Sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar (dosanya). (Q.S. al-Isra'/17:40)

Implikasinya bahwa seorang praktisi humas harus biasa menggunakan kata-kata yang mempunyai daya tarik dalam moments-moments tertentu. Tapi jangan menggunakan secara terus menerus kata-kata tersebut, karena akan menimbulkan kesulitan pemahaman bagi masyarakat umum.

2. Menggunakan bahasa komunikasi yang baik

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5)

Dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Q.S.al-Nisa'/3:5)

Kata *ma'rufan* dalam bahasa ushul fiqih berarti kebaikan yang dinilai oleh masyarakat sekitar. Sedangkan dalam penafsiran Ibn Katsir, berarti kebaikan dalam rangka menjalin persaudaraan.¹⁵ Maka untuk menjalin komunikasi *public relation* yang baik, seorang praktisi harus bisa menyesuaikan komunikasinya dengan keadaan masyarakat tersebut dan dilakukan dengan lemah lembut.

3. Menggunakan bahasa yang lemah lembut

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئِنَّا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (44)

Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut."(Q.S.Taha/20: 44)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam berbicara harus dilakukan dengan lemah lembut walaupun dengan lawan sekalipun. Lemah lembut tapi mempunyai rasa yang kuat di hati. Jadi istilahnya dengan menggunakan kata-kata yang lembut tapi menghanyutkan. Seperti yang dilakukan oleh seorang wanita. Kelembutan wanita kadang bisa mengalahkan keperkasaan seorang laki-laki.

4. Menggunakan sistem kelompok atau kerjasama dengan pihak lain dalam suatu urusan (terorganisir, ter-manage)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا تُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا (71)

¹⁵Ibid., 297.

Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu, dan majulah (ke medan pertempuran) berkelompok-kelompok, atau majulah bersama-sama! (Q.S.al-Nisa'/3:71)

Hal ini berarti dalam melakukan *humas* tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau personal, namun harus dinaungi oleh organisasi.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159)

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu¹⁶. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(Q.S.Ali Imran/3:159)

Ayat ini menunjukkan perintah musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan salah satu cara atau alat yang ampuh untuk mengatasi konflik dalam suatu organisasi dan juga merupakan salah satu kaidah dari *humas*. Musyawarah berasal dari kata *syawara-yusyawiru* yang berarti saling memberi dan meminta nasihat atau saran. Imam al-Tabrasi mendefinisikan term *as-syura* sebagai diskusi untuk menemukan hak. Sedangkan Raqib al-Asfahani menegaskan bahwa *syura* adalah upaya menemukan pemikiran yang selaras dengan pendapat orang banyak. Ibn Arabi dalam bukunya, *Ahkam Al-Qur'an* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *as-syura* adalah pertemuan yang mendiskusikan silang pendapat untuk menemukan pemikiran terbaik.¹⁷ Dengan demikian, esensi musyawarah adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan orang banyak demi menghasilkan keputusan yang terbaik bagi masyarakat atau demi kebaikan bersama.

Maka konsekuensinya seorang manajer yang melakukan *humas* harus rajin-rajin untuk bermusyawarah dengan masyarakat dan mendengarkan ide-ide masyarakat juga mensosialisasikan program dari lembaga pendidikan tersebut

¹⁶ Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

¹⁷ Ibn Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, juz 6, (Mauqi'u al-Islam: Dalam Software al-Maktabah al-Samilah, 2005), 79.

Ayat-ayat tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk hubungan sekolah dengan masyarakat, supaya praktisi humas lebih berhati-hati dan berhasil dalam menjalin hubungan dengan masyarakat.

Fungsi Sekolah Sebagai Pusat Informasi Publik

Isu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi sebenarnya sudah menjadi “adigum” yang jamak dibahas diberbagai forum dan bahan perbincangan masyarakat. Tetapi implementasi di lapangan masih banyak mengalami tantangan yang luar biasa. Pengalaman ini juga kita alami selama pendampingan Sekolah MANTAP tersebut. Tantangan paling utama yang dihadapi adalah “mengajak orang untuk berubah” yang masih sulit. Budaya patriarkhi yang masih kuat dan pardigma pelayan masyarakat yang masih belum banyak dipahami menjadi factor penghambat perubahan di sekolah. Hal ini berdampak terhambatnya bangunan relasi dan komunikasi yang lebih baik antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat.

Tantangan yang kedua adalah membangun kepedulian orang tua terhadap sekolah. Mayoritas orang tua menganggap bahwa bentuk kepeduliaan terhadap sekolah adalah berwujud material. Masih sangat jarang sekali orang tua yang mempertanyakan bagaimana kurikulum sekolah, rencana sekolah, capaian sekolah, pengelolaan anggaran, dll. Semestinya dengan adanya kebijakan pendidikan dasar yang biayanya ditanggung oleh negara, maka kewajiban orang tua tinggal mengawasinya.

Tantangan berikutnya adalah pemanfaatan tehnologi informasi yang masih terbatas di sekolah. Selain untuk mendukung pembelajaran, tehnologi informasi sebenarnya diciptakan untuk mendukung system tata kelola organisasi agar lebih baik (transparan, akuntabel, partisipatif) serta efektif dan efisien. Sayangnya, meski sekolah dan para gurunya sudah memiliki fasilitas tehnologi informasi yang memadai tetapi belum dimanfaatkan dengan baik

Sebagai sebuah upaya, maka berbagai inisiatif untuk memperkuat tata kelola sekolah yang transparan, akuntabel dan partisipatif harus terus didorong dan didukung. Dinamika sosial dan budaya yang sangat tinggi membutuhkan institusi pelayanan public yang otonom termasuk sekolah untuk terus berubah. Ada delapan hal yang perlu dikerjakan sekolah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Pertama, sekolah perlu menyusun aturan main tentang sistem transparansi-akuntabilitas serta mekanisme pertanggungjawabannya. *Kedua*, sekolah perlu menyusun

pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dilengkapi sistem pengawasan dengan sanksi jelas dan tegas. *Ketiga*, sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan kepada publik/*stakeholders* di awal setiap tahun ajaran/anggaran. *Keempat*, menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada *stakeholders*. *Kelima*, melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik/*stakeholders* di akhir tahun. *Keenam*, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik. *Ketujuh*, menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik sebagai penerima manfaat pelayanan pendidikan. *Kedelapan*, memperbaharui rencana kinerja sebagai kesepakatan komitmen baru.

Strategi di atas bertumpu pada kemampuan, niat baik, dan kemauan sekolah untuk mewujudkannya. Sekolah perlu melibatkan *stakeholders* pendidikan dalam menyusun dan memperbaharui sistem yang dianggap tidak dapat menjamin terwujudnya transparansi-akuntabilitas sekolah. Komite sekolah, orang tua siswa, kelompok profesi, dan pemerintah dapat dilibatkan untuk melaksanakannya. Sehingga *stakeholders* sekolah sejak awal tahu dan merasa memiliki akan sistem yang ada. Beberapa indikator keberhasilan transparansi dan akuntabilitas sekolah antara lain, meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah, tumbuhnya kesadaran publik tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dan meningkatnya kesesuaian kegiatan-kegiatan sekolah dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.

Banyak orang mengartikan hubungan kerjasama sekolah dan masyarakat itu dalam pengertian yang sempit. Mereka berpendapat bahwa hubungan kerjasama itu hanyalah dalam hal mendidik anak belaka. Padahal, hubungan kerjasama antara sekolah dan masyarakat itu mengandung arti yang lebih luas dan mencakup beberapa bidang. Sudah barang tentu bidang-bidang yang ada hubungannya dengan pendidikan anak-anak dan pendidikan masyarakat pada umumnya. Penulis berpendapat bahwa hubungan kerjasama sekolah dan masyarakat itu dapat digolongkan menjadi tiga jenis hubungan, yaitu:

1. Hubungan edukatif

Hubungan edukatif adalah hubungan kerjasama dalam hal mendidik anak/murid, antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Adanya hubungan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan prinsip atau bahkan pertentangan yang dapat mengakibatkan keraguan pendirian dan sikap pada diri anak. Antara sekolah yang

diwakili oleh guru dan orang tua tidak saling berbeda atau berselisih paham, baik tentang norma-norma etika maupun norma-norma sosial yang hendak ditanamkan kepada anak didik mereka.

2. Hubungan kultural

Hubungan kultural adalah kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Kita mengetahui bahwa sekolah merupakan suatu lembaga yang seharusnya dapat dijadikan barometer bagi murid-muridnya. Kehidupan, cara berpikir, kepercayaan, kesenian, adat istiadat dari masyarakat. Bahkan yang lebih diharapkan adalah hendaknya sekolah itu dapat merupakan titik pusat dan sumber tempat terpercarnya norma-norma kehidupan (norma agama, etika, sosial, estetika, dan sebagainya) yang baik bagi kemajuan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang maju. Jadi, bukanlah sebaliknya sekolah hanya mengintroduksi apa yang hidup dan berkembang di masyarakat.

3. Hubungan institusional

Hubungan institusional yaitu hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi resmi lain, baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerjasama antara sekolah dengan sekolah-sekolah lain, dengan kepala pemerintahan setempat, jawatan penerangan, jawatan pertanian, perikanan dan peternakan, dengan perusahaan-perusahaan negara atau swasta yang berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mendidik anak-anak yang nantinya akan hidup sebagai anggota masyarakat yang terdiri atas bermacam-macam golongan, jabatan, status sosial, dan bermacam-macam pekerjaan, sangat memerlukan adanya hubungan kerjasama itu. Dengan adanya hubungan ini sekolah dapat meminta bantuan dari lembaga-lembaga lain, baik berupa tenaga pengajar, pemberi ceramah tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan dan pengembangan materi kurikulum maupun bantuan yang berupa fasilitas serta alat-alat yang diperlukan bagi kelancaran program sekolah.

Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan bahwa dengan dilaksanakannya ketiga jenis hubungan sekolah dan masyarakat seperti telah diuraikan di atas, diharapkan sekolah tidak lagi selalu ketiggalan dengan perubahan dan tuntutan masyarakat yang senantiasa berkembang. Apalagi menghadapi era globalisasi seperti sekarang ini, ketika masyarakat

berubah dan berkembang dengan sangat pesatnya akibat kemajuan teknologi, sehingga seperti dikatakan oleh Tilaar, sekolah makin tercecceh dan terisolasi dari masyarakat, sekolah lebih berfungsi sebagai penjara intelek. Maka untuk dapat memperoleh kembali fungsi yang sebenarnya, sekolah harus merupakan salah satu pusat belajar dari banyak pusat belajar yang kini dikategorikan sebagai pendidikan nonformal.

Adanya hubungan sekolah dan masyarakat ini dimaksudkan pula agar proses belajar yang berlaku di sekolah mengalami perubahan, dari proses belajar dengan cara “menyuapi”, dengan bahan pelajaran yang telah dicerna oleh guru, menjadi proses belajar yang inovatif, yaitu belajar secara antisipatoris dan partisipatoris. Anak-anak dididik untuk berpartisipasi dalam arti luas di dalam kehidupan masyarakat, dan dapat mengantisipasi kehidupan masyarakat yang akan datang tempat mereka akan hidup dan terlibat didalamnya setelah mereka dewasa.

D. KESIMPULAN

Berpijak dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat memiliki posisi ganda yaitu posisi objek dan posisi subjek yang keduanya memiliki makna fungsional bagi pengelolaan lembaga pendidikan. Ketika lembaga pendidikan sedang melakukan promosi merekrut calon siswa/santri/mahasiswa baru, maka masyarakat sebagai objek yang mutlak dibutuhkan. Sedangkan respon masyarakat terhadap promosi itu menempatkan mereka sebagai subjek yang memiliki kewenangan penuh untuk menerima atau menolaknya.
2. Peran Komite Sekolah adalah: Sebagai Lembaga *PEMBERI PERTIMBANGAN* (*advisory agency*); Sebagai Lembaga *PENDUKUNG* (*supporting agency*); Sebagai Lembaga *PENGONTROL* (*controlling agency*); Sebagai *MEDIATOR*.
3. Hubungan masyarakat sangat penting dalam kepentingan suatu organisasi sekolah, jadi jelaslah bahwa dalam public relation terdapat suatu usaha untuk mewujudkan suatu hubungan yang harmonis antara sekolah dengan publik sehingga akan muncul opini publik yang menguntungkan bagi kehidupan sekolah tersebut
4. Sekolah mampu menjadi pusat informasi publik dimana sektor Humas menjadi leading sektornya. Namun untuk mewujudkan itu sekolah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya.

Saran

Berpijak dari kesimpulan di atas, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada sekolah; seyogyanya meningkatkan peran serta masyarakat melalui komite sekolah supaya mampu mengembangkan sekolah dengan baik.
2. Kepada komite sekolah; seyogyanya mampu menjadi mediator yang baik dalam peningkatan program kerja sekolah.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Ahmadi, Abu, *Sosiologi Pendidikan*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1982.
- Arabi, Ibn, *Ahkam al-Qur'an*, juz 6, Mauqi'u al-Islam: Dalam Software al-Maktabah al-Samilah, 2005.
- Brownwll, C.L., Gans, L., Maroon T.Z., *Public Relation In Education*. New York: Mc Grow Hill Book Company, Inc, 1955.
- Dharma, Surya, *Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Dirjen PMPTK, 2007.
- Dharma, Surya, *Manajemen Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Sekolah*, Jakarta: Dirjen PMPTK, 2007
- Mulyasa, E., *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Pidarta, Made, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1988.
- Stoop, Emery, et.al., *Handbook of Educational Administration Second Edition*, A. Boston: Allyn and Bacon Inc., 1981.
- Sulistiyorini, Muhammad Fathurrohman, *Esensi Manajemen Pendidikan Islam: Pengelolaan Lembaga untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras, 2014.
- Sutisna, Oteng, *Administrasi Pendidikan: Dasar Teoritis untuk Praktek Profesional*, Bandung: Angkasa, 1983.